

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan acuan dan kajian. Berikut penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian mengenai implementasi program *urban farming*.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Judul	Tujuan Penelitian	Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	(Sampeliling <i>et al.</i> , 2012), Kebijakan Pengembangan Pertanian Kota Berkelanjutan: Studi Kasus Di Dki Jakarta	1) Menganalisis tingkat keberlanjutan pertanian perkotaan, khususnya di wilayah DKI Jakarta. 2) Menganalisis faktor-faktor kunci penentu keberlanjutan pertanian perkotaan di wilayah DKI Jakarta. 3) Menyusun skenario dan opsi kebijakan pengembangan pertanian perkotaan di wilayah DKI Jakarta.	MDS (<i>multi-dimensional scaling</i>) dan teknik Rap-Ur-Agri (<i>Rapid Appraisal for Urban Agriculture</i>)	Status keberlanjutan pengembangan pertanian perkotaan pada kondisi existing menunjukkan nilai indeks 48,70 persen atau kurang berkelanjutan. Oleh karena itu terdapat beberapa opsi kebijakan sebagai berikut : perluasan lahan/ruang usaha tani, pengembangan komoditas dan teknologi ramah lingkungan dan pengembangan kelembagaan pertanian.

Lanjutan Tabel 2.1

No	Peneliti dan Judul	Tujuan Penelitian	Analisis Data	Hasil Penelitian
2.	(Yektiningsih & Dwi Nugroho, 2012), Implementation Of Urban Farming Program In Surabaya Indonesia For Decrease Poverty And Effort To Create Green	1) Mengetahui dampak pelaksanaan program urban farming terhadap lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya rumah tangga miskin, 2) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat miskin untuk mengikuti program urban farming.	Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, korelasional, dan model regresi berganda	Program urban farming memiliki manfaat ganda, menciptakan kawasan hijau yang berarti memelihara lingkungan hidup yang sehat, meningkatkan hubungan sosial masyarakat, tetapi tidak ada hubungan dengan budaya masyarakat miskin. Dengan analisis regresi ganda menunjukkan hasil bahwa hanya faktor waktu luang yang berpengaruh terhadap motivasi rumah tangga miskin dalam program urban farming Surabaya.

Lanjutan Tabel 2.1

No	Peneliti dan Judul	Tujuan Penelitian	Analisis Data	Hasil Penelitian
3.	(Sihgiyanti, 2016), Evaluasi Implementasi Program Urban Farming Oleh Dinas Pertanian Di Kota Surabaya	Mendeskrripsikan implementasi kebijakan program Urban Farming di Surabaya oleh Dinas Pertanian dalam mengentaskan kemiskinan melalui ketahanan pangan.	Penelitian ini menggunakan model teoritis implementasi kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Urban Farming dipengaruhi oleh empat faktor yaitu komunikasi, sumber daya, sikap eksekutif (disposisi), dan struktur birokrasi. Faktor-faktor tersebut saling berkesinambungan dan sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan Urban Farming di kota Surabaya.
4.	(Wiyanti, 2019), Implementasi Program Urban Farming Pada Kelompok Sumber Trisno Alami Di Kecamatan Bulak Kota Surabaya	Mendeskrripsikan implementasi program urban farming pada kelompok Sumber Trisno alami di Kecamatan Bulak Kota Surabaya. Adapun fokus penelitian yang digunakan adalah dengan menganalisis faktor ukuran dasar dan tujuan kebijakan; sumber daya kebijakan; karakteristik badan pelaksana; kondisi ekonomi, sosial, dan politik;	a. Metode survei b. Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program urban farming pada kelompok Sumber Trisno Alami belum dikatakan berhasil. Oleh karena itu pihak Dinas Pertanian harus lebih giat dalam memotivasi warga miskin agar mau melaksanakan program urban farming ini.

Lanjutan Tabel 2.1

No	Peneliti dan Judul	Tujuan Penelitian	Analisis Data	Hasil Penelitian
5.	(Athariyanto, 2013), Implementasi Program Urban Farming Di Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya	Untuk mengetahui bagaimana implementasi program urban farming di Kota Surabaya.	a. Metode survei b. Deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program urban farming di Kelurahan Made dilaksanakan dengan baik, akan tetapi pelaksanaan urban farming perlu dilaksanakan secara berkelanjutan untuk terus meningkatkan dan mengembangkan kapasitas yang dimiliki masyarakat miskin.
6.	(Rahman, 2018), Implementasi Program Urban Farming Di Kawasan Permukiman Dalam Peningkatan Persentase Ruang Terbuka Hijau Di Kota Makassar	1) Untuk mengetahui tingkat persentase pengetahuan 2) Untuk mengetahui respon masyarakat 3) Untuk mengetahui berapa persen potensi lahan pada kawasan permukiman dalam upaya pengembangan urban farming	Pemaparan secara deskriptif dengan metoda statistika analisis frekuensi dan analisis tabulasi.	1) Tingkat pengetahuan masyarakat di RW 06 Kelurahan Gunung Sari masuk dalam kategori cukup mengetahui. 2) Respon masyarakat dalam hal ini manfaat yang dirasakan responden selama menerapkan urban farming 3) Potensi lahan pekarangan belum termanfaatkan.

Lanjutan Tabel 2.1

No	Peneliti dan Judul	Tujuan Penelitian	Analisis Data	Hasil Penelitian
7.	(Salam <i>et al.</i> , 2021), Analysis of the Kendari City Government Strategy in Maintaining Food Security During the Covid-19 Pandemic	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prioritas strategis pemerintah Kota Kendari dalam menjaga ketahanan pangan di masa Pandemi Covid-19.	Data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kendari dalam menjaga ketahanan pangan selama Pandemi Covid-19 mengambil lima strategi sebagai berikut (i) memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak, (ii) menjamin distribusi pangan, (iii) memantau dan menjaga tingkat inflasi, (iv) peningkatan produksi pangan
8.	(Margareth <i>et al.</i> , 2021), Implementasi Urban Farming Berdasarkan Perspektif Political Ecology	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis dalam melihat pelaksanaan urban farming di Kota Bandung yang digunakan.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.	Pelaksanaan urban farming yang diimplementasikan berdasarkan perspektif political ecology diketahui dari policy failure (kegagalan kebijakan) dan market failure (kegagalan pasar). Kegagalan kebijakan disebabkan kebijakan pertanian yang digagas oleh Pemerintah Kota tidak berhasil.

Lanjutan Tabel 2.1

No	Peneliti dan Judul	Tujuan Penelitian	Analisis Data	Hasil Penelitian
9.	(Ayuning Tyas, 2019), Implementasi Kebijakan Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengkaji peran aktor dalam melaksanakan pemberdayaan kelompok tani KRPL Kenanga melalui program KRPL, (2) Mengetahui implementasi kebijakan program KRPL, (3) Mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam melaksanakan pemberdayaan kelompok tani KRPL Kenanga melalui program KRPL di Kelurahan Merjosari.	Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang adalah sebagai dinamisator, sedangkan peran Kelurahan Merjosari adalah sebagai fasilitator.
10	(Hatmanto & Setyono, 2019), Implementation of Sustainable Food Agriculture Land Policy Using Spatial Map, Case Study In Temanggung Regency, Central Java Province.	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji teknis pelaksanaan Perda LP2B di Kabupaten Temanggung yang telah dilengkapi dengan peta spasial.	Metode yang digunakan dalam studi ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan telaah dokumen.	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penggunaan Peta Spasial yang merupakan bagian dari Perda LP2B Temanggung menjadi instrumen penting dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian.

Lanjutan Tabel 2.1

No	Peneliti dan Judul	Tujuan Penelitian	Analisis Data	Hasil Penelitian
11.	(Sriartha & Windia, 2015), Policy Implementation Effectiveness Local Government in Controlling Subak Rice Field Function Transfer: Case Study in Badung Regency, Bali	1) Memetakan alih fungsi lahan persawahan pola ruang di wilayah metropolitan Badung Kabupaten, Provinsi Bali. 2) Menganalisis keefektifan lokal kebijakan pemerintah dalam mengendalikan alih fungsi lahan sawah.	Data dianalisis menggunakan teknik overlay Sistem Informasi Geografis (SIG), serta analisis dari efektivitas kebijakan pemerintah daerah dilakukan menggunakan dokumen literatur dan pengamatan di lapangan.	Studi ini menunjukkan bahwa distribusi spasial konversi lahan sawah membentuk pola cluster. Ini pola muncul karena sifat menular dari konversi lahan sawah yang dipengaruhi oleh pembangunan di lingkungan sekitar.
12.	(Ramadhan & Putri, 2019), The Communication Strategy Of Implementation Of Urban Farming System At RW 04 Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo Bandung City.	Untuk mengetahui model komunikasi yang diterapkan pada sistem urban farming di RW 04 Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo, Kota Bandung.	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif dengan menggunakan model perancangan komunikasi Everett M. Rogers	Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : (1) Tahap pengetahuan. Tahap pengetahuan semakin didukung dengan distribusi informasi dengan beberapa cara seperti pelatihan, pembentukan kelompok peminat, aktivis pemuda dll, sehingga menunjang tahap pengetahuan. (2) Pendekatan yang digunakan dalam

Sumber : Hasil kajian penulis, 2021

Berdasarkan tabel 2.1 diatas menunjukkan beberapa contoh hasil penelitian terdahulu yang berisikan masalah empiris yang ada, tujuan dari penelitian tersebut, hingga Analisis dan Hasil yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan. Perbedaan yang terlihat dari penelitian kali ini dengan terdahulu yaitu :

- 1) Lokasi penelitian yang berada di KRPL SERPIS, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya.
- 2) Fokus penelitian ditujukan pada kelompok tani wanita SERPIS sebagai pelakasa kegiatan urban farming.
- 3) Penggunaan Analisis SEM – PLS untuk mengetahui faktor – faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program *urban farming* di KRPL SERPIS.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu tindakan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk menyelesaikan permasalahan publik. Definisi tersebut juga dikatakan oleh Dye dalam Suharto (2010) yang memberikan definisi secara luas yakni sebagai “*whatever governments choose to do or not to do*” (apapun yang dilakukan pemerintah untuk memutuskan atau tidak memutuskan). Sementara itu Anderson dalam Suharto (2010), menyampaikan definisi kebijakan publik yang lebih spesifik yaitu sebagai “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”.

Sedangkan menurut Kartasasmita dalam Joko Widodo, (2011) kebijakan merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah, (2) apa yang

menyebabkan atau yang memengaruhinya, dan (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut.

Beberapa pengertian tentang kebijakan yang telah dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, dapat ditarik kesimpulan (Widodo, 2011) bahwa pada hakekatnya studi tentang kebijakan (*policy*) mencakup pertanyaan *What, Why, Who, Where*, dan *How*. Semua pertanyaan ini menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan. Setelah memahami dengan seksama pengertian dari kebijakan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, penting sekali bagi kita untuk menguraikan makna dari kebijakan publik, karena pada dasarnya kebijakan publik berbeda dengan kebijakan privat atau swasta.

Berdasarkan acuan dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Tahun 2016 - 2021 Kota Surabaya, Dinas Pertanian Kota Surabaya memiliki tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan. Salah satu tugas dari Dinas Pertanian Kota Surabaya yakni mengatasi permasalahan yang ada di Surabaya terkait dengan ruang terbuka hijau. Dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut, maka Dinas Pertanian membuat beberapa program kerja. Salah satu program kerja yang disusun oleh Dinas Pertanian kota Surabaya bidang Pertanian dan Kehutanan yaitu program *Urban Farming* ini. Pemerintah Kota Surabaya yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pertanian mulai menjalankan program ini pada tahun 2010. Program ini dibuat untuk memberdayakan masyarakat miskin yang tidak memiliki pekerjaan dan berpenghasilan tetap. Tujuan dari program ini yaitu untuk

meningkatkan pengembangan hutan kota melindungi lahan pertanian, serta untuk menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi.

2.2.2. Implementasi Kebijakan

Tangkilisan (2003), mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti halnya pasal-pasal sebuah undang-undang legeslatif pendekatan implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan salah satu bagian terpenting dalam proses pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2005), “implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usah-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2008) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian atau kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yaitu mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggungjawab untuk melaksanakan

program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan – kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat dan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*spillover/negative effects*) (Wahab, 2008).

Implementasi Program *urban farming* pada kelompok Rumah Pangan Lestari SERPIS di Kecamatan Wonocolo merupakan implementasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya, yang tujuannya ialah untuk meningkatkan pengembangan hutan kota melindungi lahan pertanian, serta untuk menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi.

2.2.3. Unsur – Unsur Implementasi Kebijakan

Unsur – unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada menurut Tachjan, (2006) yaitu :

1. Unsur pelaksana

Unsur pelaksana adalah implementor kebijakan, sebagai mana yang dijelaskan Tachjan (2006), Pelaksanaan kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian.

2. Adanya Program Yang Dilaksanakan

Suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting adanya tindakan yang nyata dilakukan dengan berbagai program atau kegiatan. Program atau kegiatan

merupakan rencana yang komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan.

3. Target Group Atau Kelompok Sasaran

Target group atau kelompok sasaran adalah sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang atau jasa yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan.

Kebijakan yang diimplementasikan dapat mereka patuhi atau penyesuaian diri bergantung kepada kesesuaian isi kebijakan (program) dengan harapan mereka. Selanjutnya karakteristik yang dimiliki oleh kelompok sasaran seperti : besaran kelompok sasaran, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia dan keadaan sosial ekonomi mempengaruhi terhadap efektivitas implementasi. Karakteristik tersebut sebagian dipengaruhi oleh lingkungan di mana mereka hidup baik lingkungan geografis maupun lingkungan sosial budaya.

2.2.4. Tahap-tahap Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik tentunya diharapkan berjalan secara efektif, sehingga diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. (Islamy dalam Widodo, 2011) membagi implementasi dalam dua bentuk, yaitu: (1) Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu Negara terhadap kedaulatan Negara lain, (2) Bersifat *non self-executing*, yang berarti bahwa suatu kebijakan public perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Urban farming dalam konteks ini program termasuk kebijakan yang bersifat *non self-executing*, karena perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak

agar tujuan tercapai. Ahli lain, Hogwood dan Gunn (Wahab dalam Widodo, 2011) mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut :

- 1) Tahap I : terdiri atas kegiatan-kegiatan menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas, yaitu menentukan standar pelaksanaan dan menentukan biaya yang akan digunakan berserta waktu pelaksanaan.
- 2) Tahap II : merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode.
- 3) Tahap III : merupakan kegiatan-kegiatan, berupa menentukan jadwal dan melakukan pemantauan.

Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program, yang dimaksudkan agar apabila terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat secepatnya mengambik tindakan yang sesuai. Jadi, implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan.

2.2.5. Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi yang akan digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah model implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn. Menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam Nugroho (2009), implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Van Meter dan Van Horn mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi yang disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*, yaitu:

- 1) Pertama, ukuran dan tujuan kebijakan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan.

- 2) Kedua, sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya dan waktu.
- 3) Ketiga, keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan public akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya.
- 4) Keempat, dampak kondisi-kondisi ekonomi sosial dan politik pada kebijakan public merupakan pusat perhatian yang besar. Perubahan kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi interpretasi terhadap masalah dan dengan demikian akan mempengaruhi cara pelaksanaan program, variasi-variasi dalam situasi politik berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja.
- 5) Kelima, Van Meter dan Van Horn mengungkapkan bahwa karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi.
- 6) Keenam, Van Meter dan Van Horn mengungkapkan bahwa komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan.

2.2.6. Pengertian Urban Farming

Pertanian perkotaan, dalam bahasa Inggris memiliki beberapa pemahaman, dapat disebut sebagai *Urban Farming* maupun *Urban Agriculture*. Jika dalam bahasa Indonesia, pertanian perkotaan berasal dari kata tani, dalam kamus bahasa Indonesia, tani adalah mata pencaharian dalam bentuk bercocok tanam, sedangkan pertanian adalah perihal bertani (mengusahakan tanah dengan tanam menanam).

Secara singkat pertanian perkotaan adalah kegiatan pertanian yang dilakukan di kota. Namun pertanian perkotaan lebih dari sekedar kegiatan pertanian di kota.

Menurut Mazereeuw (2005), pertanian didalam kota mempengaruhi aspek ekonomi, kesehatan, sosial dan lingkungan kota. Dengan demikian akan ada manfaat meningkatnya kesejahteraan, keadilan, kebersamaan, kenyamanan, kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan hidup. Menurut Wiyanti (2019), Urban Farming atau yang disebut sebagai pertanian perkotaan merupakan praktek pertanian (meliputi kegiatan tanaman pangan, peternakan, perikanan dan kehutanan) yang dilakukan dalam atau pinggir perkotaan. Urban farming ini dapat diartikan sebagai suatu keterampilan, keahlian, dan inovasi dalam budidaya pertanian. Bagi masyarakat (keluarga miskin) dengan memanfaatkan pekarangan, lahan-lahan kosong guna menambah gizi, meningkatkan ekonomi dan mensejahterakan keluarga serta memoyivasi keluarga miskin untuk membentuk suatu kelompok pertanian guna membangun dirinya sendiri agar lebih mandiri.

Konsep urban farming merupakan konsep pertanian pekarangan yaitu bercocok tanam yang dilakukan dan dikelola di lingkungan sekitar rumah dan pemukiman perkotaan. FAO (Food And Organization) (2008), mendefinisikan bahwa pertanian urban sebagai sebuah industry yang memproduksi, memproses, memasarkan produk dan bahan pangan nabati terutama dalam menanggapi permintaan sehari-hari konsumen di perkotaan yang menerapkan metode produksi intensif, memanfaatkan dan mendaur ulang sumber daya limbah perkotaan, serta menghasilkan beragam tanaman dan ternak. Banyak manfaat yang telah dihasilkan dari urban farming diantaranya pekarangan menjadi produktif dan dampak pencernaan limbah rumbah tangga menjadi berkurang seperti sampah dapur diolah

menjadi pupuk kompos, air limbah rumah tangga dibuatkan IPAL (Instalansi Pengelolaan Air Limbah) dan dimanfaatkan untuk menyiram tanaman sehingga tidak mencemari tanah dan udara (Wignjoprano et al., 2015).

Pengertian lain urban farming menurut Annisya, N.W. (2019) ialah aktivitas pertanian di dalam atau di sekitar kota yang melibatkan keterampilan, keahlian, dan inovasi dalam budidaya pengolahan makanan bagi masyarakat melalui pemanfaatan pekarangan, lahan-lahan kosong guna menambah gizi dan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarga untuk membentuk suatu kelompok pertanian guna untuk membangun dirinya sendiri agar lebih mandiri dan maju. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Urban Farming atau pertanian perkotaan berarti pertanian yang dilakukan di kawasan perkotaan dengan ciri khas memiliki kualitas lingkungan yang rendah serta lahan yang sempit namun disisi lain memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan sebab jarak pasar yang dekat. Di samping itu, pertanian perkotaan memiliki manfaat untuk memperbaiki ekologi yang ada di kawasan tersebut.

Lembaga Internasional FAO (2003), memposisikan pertanian perkotaan sebagai; (1) salah satu sumber pasokan sistem pangan dan opsi ketahanan pangan rumah tangga perkotaan; (2) salah satu kegiatan produktif untuk memanfaatkan ruang terbuka dan limbah perkotaan; dan (3) salah satu sumber pendapatan dan kesempatan kerja penduduk perkotaan. Karena itu, pertanian perkotaan mempunyai peluang dan prospek yang baik untuk pengembangan usahatani berbasis agribisnis dan berwawasan lingkungan.

2.2.7. Urgensi Dan Peranan *Urban Farming*

Pesatnya laju pertumbuhan populasi di perkotaan akan menimbulkan masalah lingkungan, mulai dari konversi lahan sampai degradasi kualitas lingkungan akibat polusi dan sampah. Apabila kondisi pertumbuhan populasi penduduk lebih besar dibandingkan laju produksi bahan pangan, maka akan terjadi bencana krisis pangan. Jumlah bahan pangan yang tidak cukup secara paralel akan berdampak pada ketergantungan antara suatu kawasan/wilayah terhadap kawasan lain. Hal ini terjadi terutama untuk wilayah perkotaan negara-negara berkembang, dimana wilayah tersebut semakin menjadi pusat penduduk serta permukiman dan kumpulan orang-orang dengan keragaman etnik (Jalil, 2005).

Urgensi pertanian kota menjadi meningkat ketika krisis ekonomi menyebabkan keamanan pangan menjadi pertanyaan besar. Keamanan pangan, khususnya bagi masyarakat miskin kota tampaknya akan menjadi isu yang penting di masa depan. Dengan semakin meningkatnya tekanan pada sumber-sumber produksi pangan, berkembangnya jumlah masyarakat miskin kota, pertanian kota akan menjadi satu alternatif yang sangat penting. Hasil penelitian Smit et al., (2001) menunjukkan bahwa 800 juta orang di seluruh dunia secara aktif terlibat dalam praktik ini, dan bahwa pertanian perkotaan dapat menghasilkan rata-rata 15 sampai 20 persen dari produksi pangan dunia. Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pertanian perkotaan di negara-negara berkembang juga bervariasi, mulai dari 10% di Indonesia sampai hampir 70% di Vietnam dan Nikaragua (Zezza & Tasciotti, 2010).

Melihat besarnya peranan pertanian perkotaan tersebut, Koscica (2014) berpendapat bahwa pertanian perkotaan tidak hanya sebatas mengatasi kecukupan

pangan ditengah persaingan mendapatkan sumberdaya yang langka seperti air dan tanah, tetapi juga mengatasi hal-hal tersebut dengan cara yang inovatif dan integratif untuk mengoptimalkan akses, kuantitas, dan kualitas pangan bagi kaum miskin kota. Kehadiran pertanian di wilayah perkotaan maupun daerah sekitar perkotaan memberikan nilai positif bukan hanya dalam pemenuhan kebutuhan pangan tetapi juga terdapat nilai-nilai praktis yang dapat berdampak bagi keberlanjutan ekologi maupun ekonomi wilayah perkotaan. Apabila praktek pertanian perkotaan dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan, mempunyai banyak keuntungan. Nilai kehadiran pertanian perkotaan dapat dilihat dari aspek ekonomi, ekologi, sosial, estetika, edukasi, dan wisata. Keadaan pertanian dalam masyarakat perkotaan dapat dijadikan sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan sumberdaya alam yang ada di kota dengan menggunakan teknologi tepat guna (Fauzi et al., 2016).

Pengembangan pertanian perkotaan secara terpadu dan berkelanjutan juga memiliki nilai kesehatan, edukasi serta wisata. Wilayah perkotaan yang padat dengan bangunan membuat ruang terbuka hijau (RTH) semakin terbatas. Hal ini akan berdampak pada degradasi kualitas lingkungan. Dengan adanya pertanian perkotaan ruang terbuka hijau di kota bisa bertambah, wilayah penyerap CO² menjadi lebih banyak sehingga kualitas udara menjadi lebih baik. Edukasi seperti ini yang akan muncul ketika pertanian perkotaan berkembang secara terpadu. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau bukan hanya digunakan sebagai tempat berkumpul penghuni untuk bersosialisasi dan berekreasi, melainkan juga memberi kontribusi positif bagi peningkatan kualitas dan keberlanjutan lingkungan hidup kawasan kota. Pertanian perkotaan juga memberi nilai wisata bagi penduduk kota.

Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau dan langkahnya praktik pertanian, menjadi daya Tarik tersendiri bagi masyarakat untuk berwisata sekaligus menjadi sarana edukatif bagi anak-anak (Rifqi Fauzi A, *et al.* 2016).

2.2.8. Jenis-jenis *Urban Farming* (Pertanian Perkotaan)

Menurut Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang (2016) Urban Farming memiliki beberapa tipe, yakni:

- a. Tipe A : Perkebunan dalam pot/polybag/wadah daur ulang lainnya. Tanaman yang ingin ditumbuhkan ditanam di dalam pot/polybag/wadah daur ulang serta ditempatkan di lahan yang kosong, baik dipekarangan rumah, maupun di tempat yang memungkinkan untuk ditempatkan pot/polybag/wadah, seperti di teras rumah.
- b. Tipe B : Rumah dengan tanaman produktif di halaman (satu rumah satu pohon). Tanaman yang biasanya ditanam pada tipe ini ialah tanaman tahunan yang memiliki daun yang lebat, seperti menanam pohon mangga di pekarangan rumah.
- c. Tipe C : Pekarangan rumah bermanfaat sayuran atau tanaman hias. Tipe ini hampir sama dengan tipe A, namun dalam pemilihan wadahnya tidak menggunakan pot/polybag/wadah lainnya, melainkan langsung di tanah dengan cara dibuatkan bedengan kemudian langsung ditanami.
- d. Tipe D : Tanaman pada dinding (vertikultur). Tipe ini biasanya menggunakan botol plastik bekas sebagai wadah lalu ditempelkan ke dinding pekarangan rumah atau di dinding jalan/lorong. Tanaman yang biasa ditanam merupakan tanaman sayuran yang cepat tumbuh dan dapat dipanen dengan cepat pula, seperti kangkung dan sawi.

- e. Tipe E : Tanaman merambat pada pagar. Biasanya tanaman yang digunakan ialah tanaman khusus yang memiliki sifat merambat di pagar maupun tembok rumah.

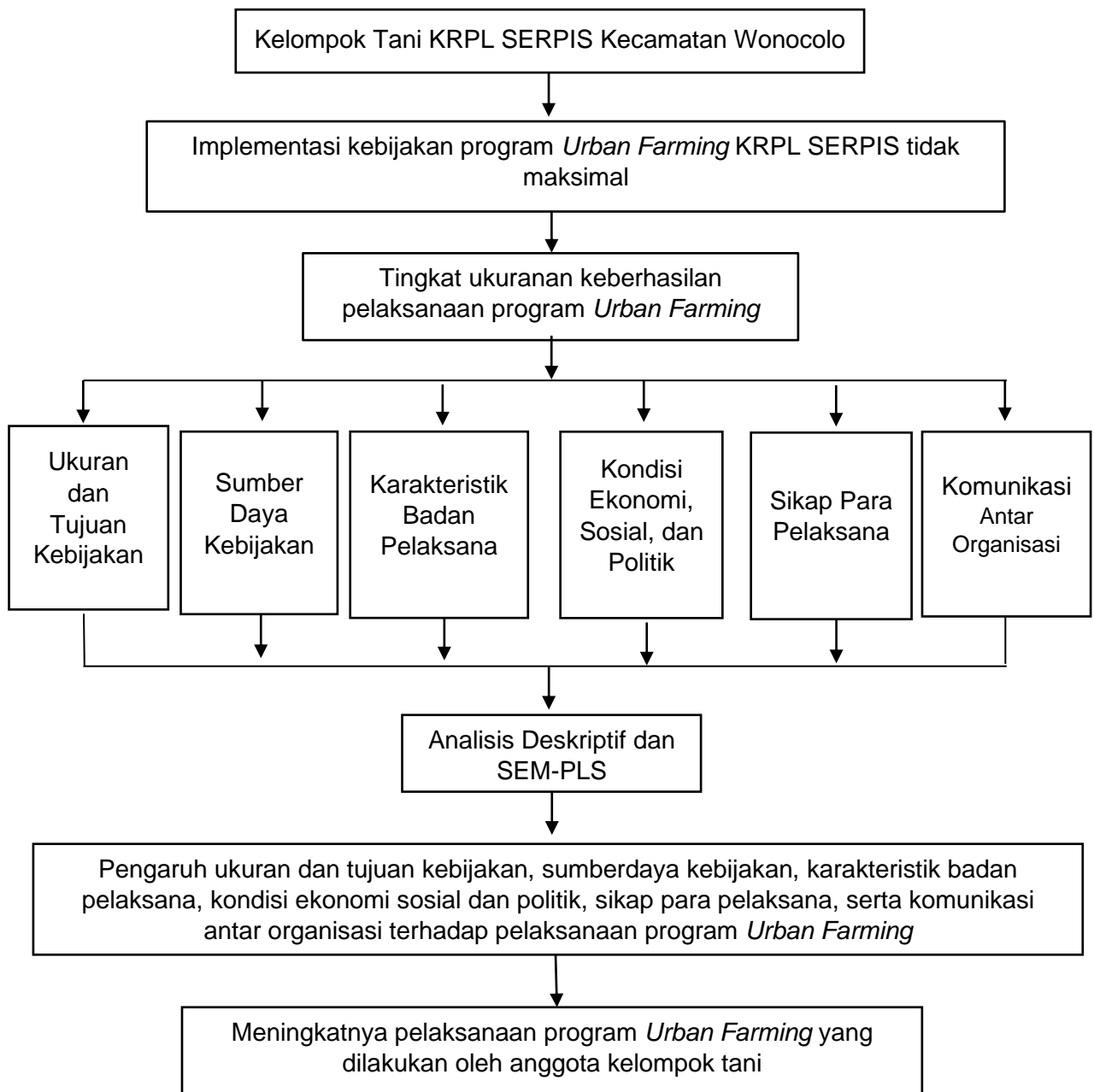
2.3. Kerangka Pemikiran

Di daerah perkotaan saat ini jumlah Ruang Terbuka Hijau yang ada semakin berkurang. Hal ini membuat kualitas lingkungan di daerah perkotaan menjadi menurun drastis. Pengolahan pemanfaatan lahan minimalis menjadi lahan produktif dapat mendukung terealisasinya pembangunan berkelanjutan (sustainable development) (Yusro, 2014). Salah satu upaya tersebut dengan mengadakan *urban farming*. Urban farming (pertanian perkotaan) merupakan sebuah upaya pemanfaatan ruang minimalis yang terdapat di perkotaan untuk dimanfaatkan agar dapat menghasilkan produksi yang mana berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan.

Kegiatan urban farming ini salah satunya sudah mulai diterapkan oleh kelompok tani KRPL SERPIS di Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Dalam pelaksanaannya, kegiatan urban farming dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik badan pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, sikap para pelaksana, serta komunikasi antar organisasi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya kebijakan, karakteristik badan pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi ekonomi sosial dan politik, dan sikap para pelaksana serta pengaruhnya terhadap pelaksanaan program Urban Farming di KRPL SERPIS Surabaya. Maka dari itu, diperlukan penelitian mengenai Implementasi Program

Urban Farming untuk mengetahui bagaimanakah implementasi kebijakan urban farming yang sudah dilakukan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis Stuctural Equation Modeling dengan pendekatan Partial Least Square (SEM-PLS). Bagan kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, landasan teori, dan penelitian terdahulu diatas, maka dalam penelitian ini diajukan hipotesis yaitu :

1. Pengaruh ukuran dan tujuan kebijakan terhadap pelaksanaan program *Urban Farming*.

Menurut Nugroho (2009) ukuran dan tujuan kebijakan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan. Berdasarkan teori dan pendapat ahli tersebut dapat ditarik hipotesis berikut :

H1 : ukuran dan tujuan kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan program *Urban Farming*.

2. Pengaruh sumber daya kebijakan terhadap pelaksanaan program *Urban Farming*.

Menurut Nugroho (2009) sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya dan waktu. Menurut Tachjan (2006) program atau kegiatan merupakan rencana yang komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Berdasarkan teori dan pendapat ahli tersebut dapat ditarik hipotesis berikut :

H2 : sumber daya kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan program *Urban Farming*.

3. Pengaruh karakteristik badan pelaksana terhadap pelaksanaan program *Urban Farming*.

Menurut Nugroho (2009) keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan public akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri – ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya. Berdasarkan teori dan pendapat ahli tersebut dapat ditarik hipotesis berikut :

H3 : karakteristik badan pelaksana berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan program *Urban Farming*.

4. Pengaruh kondisi ekonomi sosial dan politik terhadap pelaksanaan program *Urban Farming*.

Menurut Nugroho (2009) dampak kondisi – kondisi ekonomi sosial dan politik pada kebijakan public merupakan pusat perhatian yang besar. Perubahan kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi interpretasi terhadap masalah dan dengan demikian akan mempengaruhi cara pelaksanaan program, variasi-variasi dalam situasi politik berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja. Berdasarkan teori dan pendapat ahli tersebut dapat ditarik hipotesis berikut :

H4 : kondisi ekonomi sosial dan politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan program *Urban Farming*.

5. Pengaruh sikap para pelaksana terhadap pelaksanaan program *Urban Farming*.

Menurut Nugroho (2009) sikap para pelaksana berkaitan dengan bagaimana para pelaksana memberikan respon terhadap kebijakan yang akan

diimplementasikan. Berdasarkan teori dan pendapat ahli tersebut dapat ditarik hipotesis berikut :

H5 : sikap para pelaksana berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan program *Urban Farming*.

6. Pengaruh komunikasi antar organisasi terhadap pelaksanaan program *Urban Farming*.

Menurut Nugroho (2007) komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan, komunikasi antar organisasi yang didasarkan atas kegiatan sosialisasi. Berdasarkan teori dan pendapat ahli tersebut dapat ditarik hipotesis berikut :

H6 : komunikasi antar organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaksanaan program *Urban Farming*.